

PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT PADA PEMILU YANG CERDAS, OBJEKTIF, DAN BERMORAL DI KABUPATEN SUMEDANG

Wangsih¹, R. Nina Karina², Annisa Rahmadanita³

^{1,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, Indonesia

²Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, Indonesia

E-mail: ibuwangsih99@gmail.com; ninaninong@gmail.com; anis@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Pelaksanaan Pilpres tahun 2024 banyak kecurangan yang dilakukan oleh Partai Politik yang berakibat pada masyarakat belum rasional dan bermoral dalam menentukan pilihan. Hal ini tidak mencerminkan demokrasi yang baik, bahkan terjadi pembedahan politik pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, dan Bermoral di Kabupaten Sumedang. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode statistika deskriptif dengan teknik survey. Teknik analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif deskriptif univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai politik kepada masyarakat berdasarkan lima indikator pendidikan politik, maka hasil survey memperoleh rata-rata 38,31% berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Pencapaian tersebut belum menunjukkan kondisi yang diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dengan dukungan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bermoral. Rekomendasi hasil penelitian yaitu: 1) Kiranya diperlukan adanya standarisasi kurikulum atau isi program pendidikan politik bagi masyarakat yang dapat dilaksakan oleh pihak yang berwenang atau ditetapkan oleh undang-undang; dan 2) Kiranya perlu dibentuk lembaga independen yang dapat menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai moralitas serta terbebas dari vested interest sehingga lebih objektif.

Kata kunci: Pendidikan Politik; Kualitas; Cerdas; Objektif; Bermoral

POLITICAL EDUCATION BY POLITICAL PARTIES TO IMPROVE COMMUNITY'S QUALITY IN SMART, OBJECTIVE, AND ETHICAL ELECTION IN SUMEDANG REGENCY

ABSTRACT. The implementation of the 2024 Presidential Election has a lot of fraud committed by political parties, which results in the community not being rational and moral in making choices. This does not reflect a good democracy, and there is even political deception in the community. This study aims to analyze Political Education by Political Parties in Improving the Quality of Society in Smart, Objective, and Moral Elections in Sumedang Regency. The approach used is qualitative with descriptive statistical methods with survey techniques. The results showed that political education conducted by political parties to the community based on five indicators of political education, the survey results obtained an average of 38.31% in the category below moderate or tends to be less good. This achievement has not shown the expected conditions to support the organization of quality elections with the support of intelligent and moral community participation. The recommendations of the research results are: 1) It is necessary to standardize the curriculum or content of political education programs for the community that can be carried out by the authorities or stipulated by law; and 2) It is necessary to establish an independent institution that can carry out the function of political education for the community based on moral values and free from vested interests so that it is more objective.

Keywords: Political Education; Quality; Intelligent; Objective; Moral

PENDAHULUAN

Pendidikan politik bagi masyarakat merupakan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Pendidikan politik yang disampaikan kepada masyarakat baik oleh pemerintah melalui sekolah atau oleh partai politik sebagai tugas dan fungsinya, maka pada dasarnya memberikan pemahaman perihal politik secara luas kepada masyarakat tidak sekedar bagaimana memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota Legislatif, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi banyak makna bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Mengacu pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan, bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam

pasal tersebut jelas dikatakan, bahwa partai politik berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada setiap warga negara, dan setiap warga negara juga berhak menerima pendidikan itu. Misalnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat, di sini partai politik memberikan pendidikan politik secara berkala kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, tentang demokrasi, pentingnya partisipasi, dan lain-lain. Melalui pendidikan politik, diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi yang tepat bagi negaranya, seperti berpartisipasi dalam memberikan suara pada pemilihan umum.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008) tentang partai politik menjelaskan, bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Partai politik bertanggung jawab dalam memberikan pembelajaran terhadap warga negara dalam memahami dan mempunyai hak atas politik. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik juga disebutkan, bahwa fungsi partai politik antara lain sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat mempunyai wawasan yang lebih luas tentang hal yang terkait dengan kebebasan berdemokrasi.

Namun demikian sampai saat ini masih terdapat banyak fenomena yang menunjukkan, bahwa implementasi berdemokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan Pemilu belum berbanding lurus dengan kesiapan masyarakat yang secara benar menggunakan hak pilihnya dan tidak melakukan pelanggaran. Sejumlah fakta menunjukkan, bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Politik maupun masyarakat. Pelanggaran Pemilu tahun 2019 saja misalnya ada 13 jenis pelanggaran dan yang masih mendominasi yaitu pelanggaran politik uang sebanyak 24 kasus dan Tim Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebanyak 20 kasus.

Fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Politik merupakan preseden buruk bagi perkembangan budaya demokrasi yang sehat di Indonesia. Karena alih-alih dapat memberi pembelajaran yang baik bagi masyarakat dalam berdemokrasi, justru memberi contoh yang tidak baik. Jika dilihat dari jenis pelanggarannya, meliputi pelanggaran hukum pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Putusan
1.	ASN, TNI, dan POLRI ikut serta sebagai pelaksana kampanye.	11
2.	Kampanye Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet di luar Jadwal.	2
3.	Kampanye Pemilu di luar Jadwal.	3
4.	Kepala Desa melakukan perbuatan yang menguntungkan Peserta Pemilu.	18
5.	Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.	12
6.	Pelaksana, Peserta, & Tim Kampanye melanggar larangan kampanye.	20
7.	Pelaksana kampanye melibatkan orang yang dilarang untuk kampanye.	4
8.	Pemalsuan Dokumen..	13
9.	Politik Uang	24

10.	Mengacaukan, menghalangi, mengganggu jalannya kampanye.	1
11.	Merusak dan/atau menghilangkan alat Peraga Kampanye peserta Pemilu.	1
12.	Memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS.	1
13.	Menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai, menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang.	1

Sumber: Bawaslu Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan, bahwa pelanggaran yang paling banyak yaitu politik uang sebanyak 24 pelanggaran, larangan kampanye 20 pelanggaran, dan ada 18 pelanggaran Kepala Desa yang menguntungkan peserta pemilu. Fakta tersebut sangat memprihatinkan, karena seluruh pelanggaran dilakukan bukan oleh masyarakat awam, melainkan oleh Partai Politik peserta pemilu dan aparat pemerintah yang seharusnya dapat memberikan pembelajaran politik terhadap masyarakat agar dapat berpartisipasi secara sehat dalam pemilu.

Hal ini berarti perlu langkah antisipasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar pelaksanaan Pemilu pada tahun-tahun berikutnya dapat meminimalisir pelanggaran. Hal ini merupakan agenda nasional untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang benar dan bertanggungjawab. Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 ada 173 putusan. “Putusan itu terdiri dari politik uang ada 83 putusan, mencoblos lebih dari sekali 65 putusan, menyebabkan suara tidak bernilai, adanya tambahan atau pengurangan hasil suara sebanyak 43 putusan, dan netralitas kepala desa ada 31 putusan” (HS, 2023).

Pendidikan politik kepada masyarakat selama ini dilakukan partai politik, tentunya setiap partai politik memiliki tujuan yang lebih berorientasi pada perolehan suara melalui berbagai doktrin yang bersifat subjektif, dari pada memberikan pembelajaran politik dengan melibatkan nalar yang sehat, bermoral dan objektif. Secara normatif mestinya Partai Politik melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih cerdas, objektif, dan bermoral dalam berpartisipasi politik. Namun hal ini sangat sulit diwujudkan, karena setiap partai politik tidak berkepentingan dengan pemilih yang cerdas apalagi bermoral, melainkan lebih berkepentingan dengan pemilih yang dapat diarahkan atau dieksploitir untuk kepentingan kemenangan partai.

Berdasarkan pada paparan berbagai fenomena di atas menunjukkan, bahwa terdapat gap antara harapan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam Pemilu secara cerdas dan bermoral dengan fakta di lapangan yang menunjukkan adanya kebodohan masyarakat dalam memilih dan masih banyaknya pelanggaran yang justru dilakukan oleh Partai Politik peserta pemilu yang seharusnya memberi pendidikan politik yang sehat terhadap masyarakat.

Terkait dengan fenomena gap tersebut, maka diperlukan adanya penelitian untuk mendeskripsikan secara faktual tentang pendidikan politik yang dilakukan Partai Politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bermoral dalam Pemilu. Hal ini dipandang sangat urgen, agar penyelenggaraan Pemilu terus meningkat kualitasnya sebagai bagian tak terpisahkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Penelitian terdahulu mengkaji pendidikan politik dengan berbagai perspektif. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh AkbarAba et al. (2023) yang menyatakan bahwa partai politik sebaiknya fokus pada peran pembaruan dan pendidikan politik, yang memiliki posisi strategis. Di samping itu, Hasyim & Azkia (2023) juga mengkaji pendidikan politik secara khusus diberikan oleh pemilih pemula. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dapat dilakukan secara langsung, melalui audio visual dan media cetak (Andika & Try Setyasih, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan Prasetya & Ishaq (2024) menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik guna membangun kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, yang dengan demikian memungkinkan publik untuk

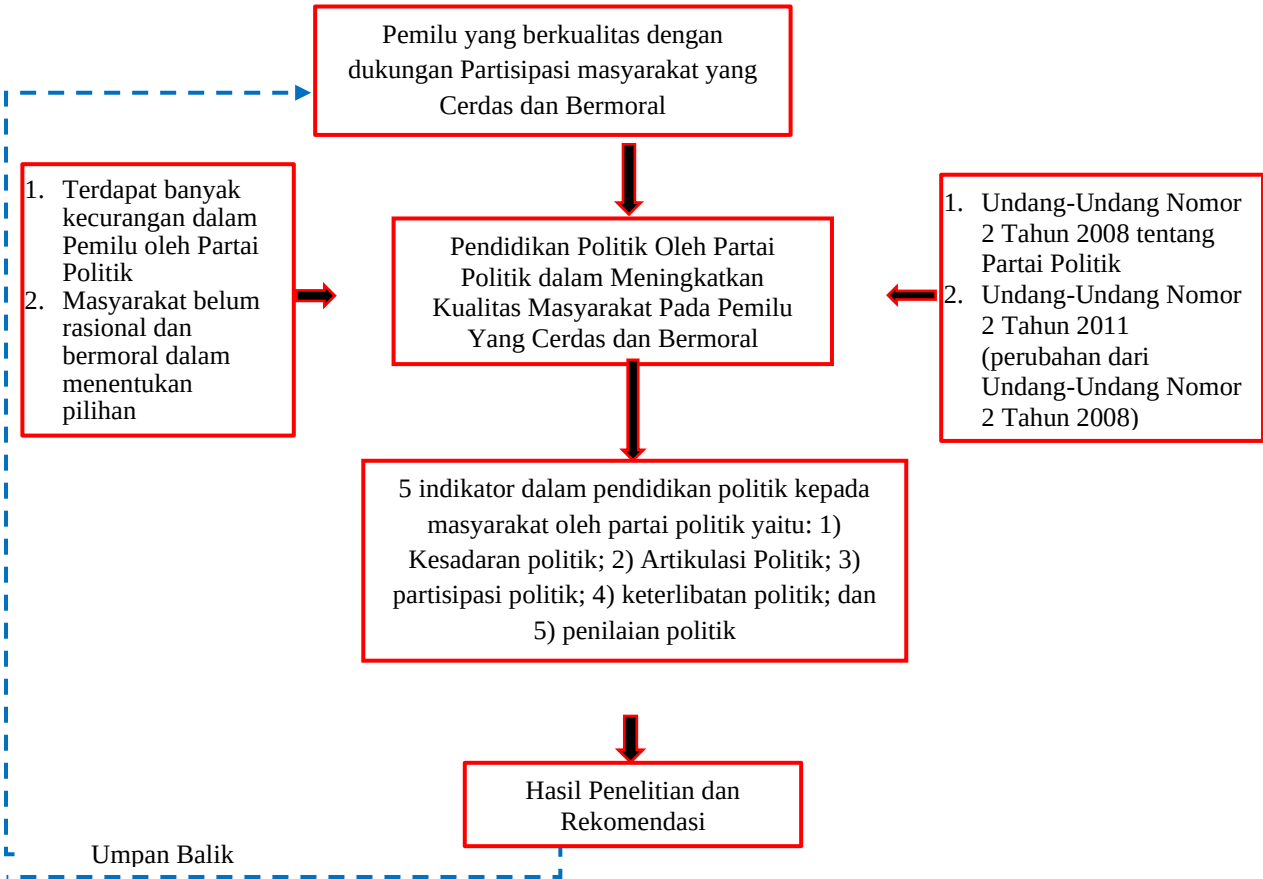
membuat pilihan yang tepat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Gustiar, et. al (2023) menyebutkan bahwa adanya pendidikan dan budaya dapat memengaruhi perkembangan politik. Selain itu, disebutkan bahwa adanya pendidikan politik yang dilakukan di lembaga pendidikan tinggi merupakan suatu model yang berhasil dilakukan (Zheng, 2024). Sejalan dengan hal tersebut temuan penelitian Jie (2024) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang dari lingkungan pekerjaan terhadap pendidikan ideologi dan politik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada konteks pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Untuk melakukan pengukuran terhadap efektivitas pendidikan politik di atas, peneliti menggunakan teori Prasad et. al sebagaimana dikutip oleh Rusman (2020) yang menetapkan 5 (lima) aspek dalam pendidikan politik, yaitu: 1) kesadaran politik; 2) artikulasi politik; 3) partisipasi politik; 4) keterlibatan politik; 5) pertimbangan keputusan politik. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana pendidikan politik oleh partai politik dalam meningkatkan kualitas masyarakat pada Pemilu yang Cerdas, Objektif, dan Bermoral di Kabupaten Sumedang? Untuk mendukung tujuan penelitian tersebut, maka peneliti mengetahui data dan informasi yang memuat tentang: 1) Pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat pada Pemilu yang cerdas, objektif, dan bermoral; 2) Pendidikan politik dalam meningkatkan artikulasi politik masyarakat pada Pemilu yang cerdas, objektif, dan bermoral; 3) Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu yang cerdas, objektif, dan bermoral; 4) Pendidikan politik dalam meningkatkan ketelibatan politik masyarakat pada Pemilu yang cerdas, objektif, dan bermoral; 5) Pendidikan politik dalam meningkatkan pertimbangan politik masyarakat pada Pemilu yang cerdas, objektif, dan bermoral.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan partai politik tidak semata-mata untuk mendulang suara atau memperoleh kursi di legislatif saja dengan menghalalkan segala cara, tetapi lebih dari itu mengajarkan pada masyarakat secara cerdas dan kritis juga beretika atau bermoral dalam menggunakan hak pilih pada kegiatan pemilihan umum. Namun demikian, kenyataannya sampai saat ini pelaksanaan pemilihan umum masih ditandai dengan banyak pelanggaran, dan juga diwarnai oleh para pemilih yang tidak cerdas dan tidak bermoral dalam menentukan pilihan. Bahkan yang lebih memprihatinkan, keputusan para pemilih lebih banyak ditentukan oleh politik uang. Jika aktivitas politik masyarakat dan para petinggi partai sudah meninggalkan etika atau moralitas, maka bangsa ini sedang menuju kehancuran. Terkait hal tersebut, maka pendidikan politik bagi masyarakat perlu terus dilakukan. Namun pelaksanaan pendidikan politik selama ini dilakukan oleh partai politik yang tentunya memiliki kepentingan untuk memenangkan partainya, sehingga pendidikan politik diduga tidak berjalan dengan semestinya. Karena itu upaya mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sulit tercapai. Terkait inilah penulis tergerak untuk meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pada Pemilu Yang Cerdas Dan Bermoral.

Untuk melakukan pengukuran terhadap efektivitas pendidikan politik di atas, penulis menggunakan teori Prasad et. al sebagaimana dikutip oleh Rusman (2020) yang menetapkan 5 (lima) aspek dalam pendidikan politik, yaitu: 1) kesadaran politik; 2) artikulasi politik; 3) partisipasi politik; 4) keterlibatan politik; 5) pertimbangan keputusan politik. Hasil pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai politik dapat dikatakan efektif, apabila kualitas penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu berlangsung dengan melibatkan rasionalitas dan bermoral serta minim pelanggaran atau politik uang. Berdasarkan pada hasil temuan penelitian dan analisis teoretik, kemudian penulis memberikan rekomendasi untuk berbagai pihak terkait dan bertanggung jawab dalam membangun budaya politik yang cerdas dan bermoral. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode statistika deskriptif dengan teknik survey. Statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2020). Adapun kisi-kisi operasional variabel penelitian terkait pendidikan politik sebagai berikut.

Tabel 2.

Operasional Konsep Penelitian

No.	Aspek	Dimensi	Indikator
1	Pendidikan Politik Masyarakat (Prasad et al. sebagaimana dikutip oleh Rusman (2020))	1. Kesadaran Politik	1. Kesadaran hak politik 2. Kesadaran isu politik 3. Kesadaran resiko dalam politik 4. Keasadaran keputusan politik
		2. Artikulasi Politik	1. Penyampaian aspirasi 2. Terakomodirnya aspirasi 3. Kepuasan terhadap partai politik
		3. Partisipasi Politik	1. Partisipasi dalam persiapan 2. Partisipasi dalam pelaksanaan 3. Partisipasi dalam pengawasan
		4. Keterlibatan Politik	1. Keterlibatan kepentingan 2. Keterlibatan dalam kampanye 3. Komitmen ideologis
		5. Pertimbangan Politik	1. Pertimbangan akal sehat 2. Pertimbangan kelompok/daerah 3. Pertimbangan moral

Sumber: Prasad, et al. sebagaimana dikutip oleh Rusman (2020) diolah Peneliti Tahun 2024

Anggota populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dewasa dan atau yang telah memiliki hak pilih dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sumedang, yang tersebar di 26 kecamatan. Melalui teknik acak, kecamatan yang ditetapkan sebagai tempat populasi penelitian yaitu Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Cimalaka. Selanjutnya di setiap kecamatan ditetapkan satu desa/kelurahan, sehingga diperoleh 4 (empat) desa/kelurahan tempat populasi penelitian yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.
Jumlah Populasi

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah DPT
1	Sumedang Selatan	Cipameungpeuk	3236
2	Sumedang Utara	Rancamulya	3899
3	Cimalaka	Cibeureum Kulon	2989
4	Tanjungsari	Cijambu	3723
Jumlah			13847

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *proportional random sampling*. Menurut Sugiyono (2020) teknik proportional random sampling adalah pengambilan sampel dimana semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel sesuai dengan proporsinya, banyak atau sedikit populasi. Untuk menghitung besarnya ukuran sampel dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin dalam Riduwan (2009) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{13847}{1 + (13847) (0.05)^2}$$

$$n = \frac{13847}{35,6175}$$

$n = 388,77$ dibulatkan menjadi 400 orang pemilih tetap.

Setelah besar ukuran sampel diketahui, selanjutnya sebaran sampel penelitian dihitung secara proporsional setiap desa sebagai berikut:

Tabel 4.
Perhitungan Proporsional Sampel Penelitian

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah DPT	Perhitungan Proporsional	Jumlah Sampel
1	Cipameungpeuk	3236	$(3236 \times 400) : 13847 = 93,48$	93
2	Rancamulya	3899	$(3899 \times 400) : 13847 = 112,63$	113
3	Cibeureum Kulon	2989	$(2989 \times 400) : 13847 = 86,34$	86
4	Cijambu	3723	$(3723 \times 400) : 13847 = 107,67$	108
Jumlah		13847		400

Adapun teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis kuantitatif deskriptif univariat karena hanya ada satu variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, Dan Bermoral Di Kabupaten Sumedang

1. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian dari penyebaran angket kepada responden sebanyak 400 orang yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap 2024 di Kabupaten Sumedang, disajikan sebagai berikut:

1.1. Data Hasil Skor Capaian Responden Yang Didasarkan Hasil Dari Masing-Masing Item Pertanyaan Untuk Setiap Indikator

a. Kesadaran Politik

Untuk mengetahui Partai politik mengajari masyarakat agar memiliki kesadaran hak politik untuk digunakan dalam pemilu sebaik-baiknya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.

Partai Politik Mengajari Masyarakat Agar Memiliki Kesadaran Hak Politik Untuk Digunakan Dalam Pemilu Sebaik-Baiknya

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	48	12,00
2.	Sering	38	9,60
3.	Kadang-Kadang	42	10,40
4.	Jarang	104	26,00
5.	Tidak Pernah	168	42,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 1

Data pada tabel di atas menunjukkan, 42,00% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat agar memiliki kesadaran hak politik untuk digunakan dalam pemilu sebaik-baiknya, 26,00 % atau hampir setengahnya lagi menyatakan jarang melakukan. Sisanya masing-masing sebagian kecil 12,00% menyatakan selalu memberikan, 10,40% kadang-kadang memberikan, dan 9,60% sering memberikan. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik pada umumnya kurang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hak politik untuk digunakan dalam pemilu sebaik-baiknya.

Untuk mengetahui partai politik menjelaskan masalah-masalah politik yang harus diatasi oleh bangsa Indonesia, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.

Partai Politik Menjelaskan Masalah-Masalah Politik Yang Harus Diatasi Oleh Bangsa Indonesia

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	42	10,40
2.	Sering	54	13,60
3.	Kadang-Kadang	35	8,80
4.	Jarang	109	27,20
5.	Tidak Pernah	160	40,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 2

Data pada tabel di atas menunjukkan 40,00% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah menjelaskan masalah-masalah politik yang harus diatasi oleh bangsa Indonesia, 27,20% atau hampir setengahnya lagi menyatakan jarang menjelaskan, sisanya masing-

masing sebagian kecil 13,60% menyatakan sering menjelaskan, 10,40% menyatakan selalu menjelaskan, dan 8,80% menyatakan kadang-kadang menjelaskan. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik pada umumnya kurang berusaha untuk menjelaskan masalah-masalah politik yang harus diatasi oleh bangsa Indonesia.

Selanjutnya untuk mengetahui partai politik mengajari masyarakat untuk tidak menjual hak politik dengan pemberian uang atau politik uang, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.
Partai Politik Mengajari Masyarakat Untuk Tidak Menjual Hak Politik Dengan Pemberian Uang Atau Politik Uang

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	38	9,40
2.	Sering	43	10,80
3.	Kadang-Kadang	42	10,40
4.	Jarang	103	26,00
5.	Tidak Pernah	174	43,40
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 3

Data pada tabel di atas menunjukkan, 43,40% atau kurang dari setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat untuk tidak menjual hak politik dengan pemberian uang atau politik uang, 26,00% atau hampir setengahnya lagi menyatakan jarang mengajari. Sisanya masing-masing sebagian kecil 10,80% menyatakan sering mengajari, 10,40% menyatakan selalu mengajari, dan 9,40% menyatakan kadang-kadang mengajari. Untuk mengetahui partai politik mengajari masyarakat untuk teguh mempertahankan hak politik ketika ada ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Partai Politik Mengajari Masyarakat Untuk Teguh Mempertahankan Hak Politik Ketika Ada Ancaman Dari Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	38	9,40
2.	Sering	43	10,80
3.	Kadang-Kadang	42	10,40
4.	Jarang	103	26,00
5.	Tidak Pernah	174	43,40
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 4

Data pada tabel di atas menunjukkan, 43,40% atau kurang dari setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat untuk teguh mempertahankan hak politik ketika ada ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab, 26,00% atau hampir setengahnya lagi menyatakan jarang mengajari. Sisanya masing-masing sebagian kecil 10,80% menyatakan sering mengajari, 10,40% menyatakan selalu mengajari, dan 9,40% menyatakan kadang-kadang mengajari. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik pada umumnya kurang mengajari masyarakat untuk teguh mempertahankan hak politik ketika ada ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

b. Artikulasi Politik

Untuk mengetahui partai politik mengajari masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi politik tanpa rasa takut, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.
Partai Politik Mengajari Masyarakat Untuk Aktif Menyampaikan Aspirasi Politik Tanpa Rasa Takut

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	29	7,20
2.	Sering	44	11
3.	Kadang-Kadang	51	12,80
4.	Jarang	115	28,80
5.	Tidak Pernah	161	40,20
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 5

Data pada tabel di atas menunjukkan 40,20% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi politik tanpa rasa takut, 28,80% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang mengajari. Sisanya masing-masing sebagian kecil 12,80% responden menyatakan kadang-kadang mengajari, 11,00% menyatakan sering mengajari, dan 7,20% menyatakan selalu mengajari. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik pada umumnya kurang mengajari masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi politik tanpa rasa takut. Selanjutnya untuk mengetahui partai politik mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi politik yang disampaikan masyarakat, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Partai Politik Mengakomodir Dan Memperjuangkan Aspirasi Politik Yang Disampaikan Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	32	8,00
2.	Sering	51	12,80
3.	Kadang-Kadang	45	11,20
4.	Jarang	112	28,00
5.	Tidak Pernah	160	40,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 6

Data pada tabel di atas menunjukkan, 40,00% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi politik yang disampaikan masyarakat, 28,00% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang mengakomodir. Sisanya masing-masing sebagian kecil 12,80% responden menyatakan sering mengakomodir, 11,20% kadang-kadang mengakomodir, dan 8,00% menyatakan sering mengakomodir.

Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik pada umumnya kurang mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi politik yang disampaikan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui partai politik memberi kepuasan terhadap masyarakat dengan mewujudkan aspirasi masyarakat, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10.
Partai Politik Memberi Kepuasan Terhadap Masyarakat Dengan Mewujudkan Aspirasi Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	42	10,40
2.	Sering	54	13,60
3.	Kadang-Kadang	48	12,00
4.	Jarang	109	27,20
5.	Tidak Pernah	147	36,80
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 7

Data pada tabel di atas menunjukkan, 36,80% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah memberi kepuasan terhadap masyarakat dengan mewujudkan aspirasi masyarakat, 27,20% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang memberi kepuasan. Sisanya masing-masing sebagian kecil 13,60% responden menyatakan sering memberi kepuasan, 12,00% menyatakan kadang-kadang memberi kepuasan, dan 10,40% menyatakan selalu memberi kepuasan. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik secara umum kurang memberi kepuasan terhadap masyarakat dengan acara mewujudkan aspirasi masyarakat.

c. Partisipasi Politik

Untuk mengetahui partai politik mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada persiapan pelaksanaan pemilu, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.
Partai Politik Mengajak Masyarakat Untuk Berpartisipasi Pada Persiapan Pelaksanaan Pemilu

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	32	8,00
2.	Sering	64	16,00
3.	Kadang-Kadang	48	12,00
4.	Jarang	109	27,20
5.	Tidak Pernah	147	36,80
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 8

Data pada tabel di atas menunjukkan, 36,80% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada persiapan pelaksanaan pemilu, 27,20% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang mengajak. Sisanya masing-masing sebagian kecil 16,00% menyatakan sering mengajak, 12,00% kadang-kadang mengajak, dan hanya 8,00% yang menyatakan selalu mengajak. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik secara umum kurang berupaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada persiapan pelaksanaan pemilu

Untuk mengetahui partai politik mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai panitia pelaksanaan pemilu, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12.
Partai Politik Mengajak Masyarakat Untuk Berpartisipasi Sebagai Panitia Pelaksanaan Pemilu

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	35	8,80
2.	Sering	64	16,00
3.	Kadang-Kadang	51	12,80
4.	Jarang	122	30,40
5.	Tidak Pernah	128	32,00
Jumlah		125	100

Sumber: Angket No. 9

Data pada tabel di atas menunjukkan, 32,00% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai panitia pelaksanaan pemilu, 30,40% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang mengajak. Sisanya masing-masing sebagian kecil 16,00% responden menyatakan sering mengajak, 12,00% menyatakan kadang-kadang mengajak, dan 8,80% menyatakan selalu mengajak. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik secara umum kurang berupaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai panitia pelaksanaan pemilu. Selanjutnya untuk mengetahui partai politik mengajak masyarakat untuk berperan

aktif mengawasi pemilu agar berlangsung luber dan jujur, datanya dapat dilihat datanya pada tabel berikut.

Tabel 13.
Partai Politik Mengajak Masyarakat Untuk Berperan Aktif Mengawasi Pemilu Agar Berlangsung Luber Dan Jurdil

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	26	6,40
2.	Sering	61	15,20
3.	Kadang-Kadang	51	12,80
4.	Jarang	102	25,60
5.	Tidak Pernah	160	40,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 10

Data pada tabel di atas menunjukkan, 40,00% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pemilu agar berlangsung luber dan jujur, 25,60% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang mengajak. Sinyanya masing-masing sebagian kecil 15,20% menyatakan sering mengajak, 12,80% menyatakan kadang-kadang mengajak, dan 6,30% menyatakan selalu mengajak. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik secara umum kurang mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pemilu agar berlangsung luber dan jujur.

d. Keterlibatan Politik

Untuk mengetahui partai politik mengajari masyarakat untuk terlibat dalam politik atas dasar kepentingan bangsa dan negara yang harus diperjuangkan, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14.
Partai Politik Mengajari Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Politik Atas Dasar Kepentingan Bangsa dan Negara Yang Harus Diperjuangkan

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	26	6,40
2.	Sering	48	12,00
3.	Kadang-Kadang	48	12,00
4.	Jarang	118	29,60
5.	Tidak Pernah	160	40,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 11

Data pada tabel di atas menunjukkan 40,00% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat untuk terlibat dalam politik atas dasar kepentingan bangsa dan negara yang harus diperjuangkan, 29,60% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang mengajak. Sinyanya masing-masing sebagian kecil 12,00% responden menyatakan sering mengajak, 12,00% menyatakan kadang-kadang mengajak, dan 6,40% responden menyatakan selalu mengajak. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik secara umum kurang mengajari masyarakat untuk terlibat dalam politik atas dasar kepentingan bangsa dan negara yang harus diperjuangkan.

Untuk mengetahui partai politik mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kampanye dalam berbagai bentuknya, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15.
Partai Politik Mengajak Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Kampanye Dalam Berbagai Bentuknya

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	46	11,40
2.	Sering	48	12,00
3.	Kadang-Kadang	28	7,00
4.	Jarang	126	31,60
5.	Tidak Pernah	152	38,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 12

Data pada tabel di atas menunjukkan, 38,00% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kampanye dalam berbagai bentuknya, 29,60% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang mengajak. Sisanya masing-masing sebagian kecil 12,00% menyatakan sering mengajak, 11,40% menyatakan selalu mengajak, dan 7,00% responden menyatakan kadang-kadang mengajak.

Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik secara umum kurang terbiasa mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kampanye dalam berbagai bentuknya. Selanjutnya untuk mengetahui partai politik mengajak masyarakat agar memiliki komitmen kuat dalam perjuangan ideologi, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16.
Partai Politik Mengajari Masyarakat Agar Memiliki Komitmen Kuat Dalam Perjuangan Ideologi

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	35	8,80
2.	Sering	64	16,00
3.	Kadang-Kadang	51	12,80
4.	Jarang	122	30,40
5.	Tidak Pernah	128	32,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 12

Data pada tabel di atas menunjukkan, 32,00% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat agar memiliki komitmen kuat dalam perjuangan ideologi, 30,40% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang mengajak. Sisanya masing-masing sebagian kecil 16,00% sering mengajak, 12,80% kadang-kadang mengajak, dan 8,80% responden menyatakan selalu mengajak.

Temuan di atas mengindikasikan, bahwa guru pada umumnya kurang berperilaku sabar dalam melakukan tindakan mengatasi masalah siswa, sehingga sering sia-sia.

e. Pertimbangan Politik

Untuk mengetahui partai politik mengajari masyarakat untuk menentukan pilihan atas dasar pertimbangan akal sehat pribadi, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Partai Politik Mengajari Masyarakat Untuk Menentukan Pilihan Atas Dasar Pertimbangan Akal Sehat Pribadi

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	26	6,40
2.	Sering	48	12,00
3.	Kadang-Kadang	51	12,80
4.	Jarang	118	29,60
5.	Tidak Pernah	157	39,20
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 14

Data pada tabel di atas menunjukkan 39,20% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat untuk menentukan pilihan atas dasar pertimbangan akal sehat pribadi, 29,60% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang mengajari. Sisanya masing-masing sebagian kecil 12,80% menyatakan kadang-kadang mengajari, 12,00% menyatakan sering mengajari, dan 6,40% responden menyatakan selalu mengajari. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik secara umum kurang mengajari masyarakat untuk menentukan pilihan atas dasar pertimbangan akal sehat pribadi. Selanjutnya untuk mengetahui partai politik mengajari masyarakat agar kepentingan kelompok yang sempit tidak menjadi pertimbangan, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18.

Partai Politik Mengajari Masyarakat Agar Kepentingan Kelompok Yang Sempit Tidak Menjadi Pertimbangan

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	48	12,00
2.	Sering	54	13,60
3.	Kadang-Kadang	45	11,20
4.	Jarang	109	27,20
5.	Tidak Pernah	144	36,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 15

Data pada tabel di atas menunjukkan 36,00% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat agar kepentingan kelompok yang sempit tidak menjadi pertimbangan, 27,20% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang mengajari. Sisanya masing-masing sebagian kecil, 13,60% menyatakan sering mengajari, 12,00% menyatakan selalu mengajari, dan 11,20% responden menyatakan kadang-kadang mengajari. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik secara umum kurang mengajari masyarakat agar kepentingan kelompok yang sempit tidak menjadi pertimbangan. Selanjutnya untuk mengetahui partai politik mengajari masyarakat agar pertimbangan moralitas harus diutamakan dalam menentukan pilihan, datanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19.

Partai Politik Mengajari Masyarakat Agar Pertimbangan Moralitas Harus Diutamakan Dalam Menentukan Pilihan

No	Alternatif Jawaban	f	%
1.	Selalu	37	9,25
2.	Sering	38	9,50
3.	Kadang-Kadang	52	13,00
4.	Jarang	125	31,25
5.	Tidak Pernah	148	37,00
Jumlah		400	100

Sumber: Angket No. 16

Data pada tabel di atas menunjukkan 37,00% atau hampir setengahnya responden menyatakan, bahwa partai politik tidak pernah mengajari masyarakat agar pertimbangan moralitas harus diutamakan dalam menentukan pilihan, 31,25% atau hampir setengahnya lagi responden menyatakan jarang mengajari. Sisanya masing-masing sebagian kecil 13,00% menyatakan kadang-kadang mengajari, 9,50% sering mengajari dan 9,25% selalu mengajari. Temuan di atas mengindikasikan, bahwa partai politik secara umum kurang mengajari masyarakat agar pertimbangan moralitas harus diutamakan dalam menentukan pilihan.

1.2. Data Penelitian Berdasarkan Sub Indikator dan Indikator

Data-data di atas selanjutnya diakumulasikan untuk menentukan skor bagi setiap sub indikator. Berdasarkan pada hasil perhitungan skor setiap sub indikator tersebut, selanjutnya skor sub indikator pada tiap indikator diakumulasikan, yang hasilnya sebagai berikut.

**Tabel 20. Berpikir Reflektif Guru Dalam Mengatasi Masalah Siswa Di Sekolah
Tiap Indikator**

Indikator	Jumlah Responden	Nilai Total	Nilai Rata2	%
Kesadaran Politik	1600	3539	2,21	44,24
Artikulasi Politik	1200	2703	2,25	46,20
Partisipasi Politik	1200	2772	2,31	46,20
Keterlibatan Politik	1200	2728	2,27	45,47
Pertimbangan Politik	1200	2712	2,32	45,20

Data pada tabel di atas menunjukkan, bahwa Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pada Pemilu Yang Cerdas Dan Bermoral, rata-rata berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Capaian aspek meningkatkan kesadaran politik masyarakat pada Pemilu, hanya sebesar 44,24% berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Capaian aspek meningkatkan artikulasi politik masyarakat pada Pemilu, hanya sebesar 46,20% berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Capaian aspek meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu, hanya sebesar 46,20% berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Capaian aspek meningkatkan keterlibatan politik masyarakat pada Pemilu, hanya sebesar 45,47% berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Dan capaian aspek meningkatkan pertimbangan politik masyarakat pada Pemilu, hanya sebesar 45,20% berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik.

Selanjutnya untuk mengetahui data capaian persentase variabel tentang Pendidikan Politik oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pada Pemilu Yang Cerdas Dan Bermoral, maka capaian tiap indikator diakumulasikan, dengan penghitungan sebagai berikut.

$$\text{Persentase Capaian Variabel} = \frac{14454}{32000} \times 100\% = 45,17 \%$$

Hasil pengitungan di atas menunjukkan, bahwa Pendidikan Politik oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pada Pemilu Yang Cerdas Dan Bermoral hanya mencapai 45,17%, berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Pencapaian tersebut belum menunjukkan kondisi yang diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dengan dukungan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bermoral.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

Temuan di atas menunjukkan, bahwa secara umum capaian pendidikan politik oleh partai politik dalam meningkatkan kualitas masyarakat pada Pemilu yang cerdas dan bermoral belum memuaskan, karena persentasenya dibawah 50%. Hasil penelitian tersebut dianalisis sebagai berikut.

2.1.1. Kesadaran Politik

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang dewasa perlu terlibat aktif secara sadar dalam setiap keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Kesadaran politik mendorong warga negara untuk terlibat aktif dalam partisipasi politik di Indonesia. Menurut Ruslan (2000), kesadaran politik meliputi adanya pengetahuan, orientasi, dan nilai yang diharapkan dapat membentuk Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, Dan Bermoral Di Kabupaten Sumedang

(Wangsih, R. Nina Karina, Annisa Rahmadanita)

pandangan politik seseorang, khususnya apabila berkaitan dengan kekuasaan politik. Demikian pula dikatakan Surbakti (2010) menjelaskan bahwa kesadaran tiap individu terkait dengan kewajiban dan haknya merupakan definisi dari kesadaran politik. Masih menurut Surbakti (2010), bahwa apabila seseorang memiliki kesadaran terhadap politik, maka sejalan dengan tingkat partisipasi politik yang semakin baik pula. Selain itu menurut Budiardjo (2008), semakin sadar seseorang bahwa dirinya dipimpin, maka seseorang akan menuntut diberikan hak untuk bersuara guna untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, maka kesadaran politik merupakan faktor dominan yang sangat mempengaruhi partisipasi politik seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu wilayah. Sebagian besar pendidikan politik yang dilaksanakan partai-partai melalui kaderisasi dan sarasehan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman langsung bagi kader dan calon kader, terutama di tengah tantangan rendahnya kesadaran masyarakat tentang peran partai politik sebagai sarana partisipasi politik yang penting dan bukan sesuatu yang perlu ditakuti (Jannah, 2023). Kesadaran politik setiap orang dewasa di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi merupakan hal yang harus diwujudkan melalui proses pendidikan politik yang mengedepankan aspek akademis dan moralitas, bukan pendidikan politik yang mengedepankan doktrinitas. Tanpa adanya pendidikan politik, maka rakyat akan dieksploitir untuk kepentingan kekuasaan.

2.1.2. Artikulasi Politik

Kesadaran terhadap hak dan kewajiban politik akan mendorong individu atau kelompok untuk melakukan artikulasi politik berupa penyampaian aspirasi, saran, bahkan kritik terhadap dinamika politik yang ada. Dalam sistem demokrasi, maka artikulasi politik yang dilakukan oleh partai politik atau masyarakat sebagai warga negara menjadi barometer apakah demokrasi berjalan baik atau tidak.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, peran partai politik sangat penting bagi Indonesia. Peranan ini selaras dengan pengertiannya yang dijelaskan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002. Dalam Pasal 1 dijelaskan, partai politik adalah politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, melalui pemilihan umum.

Partai politik yang berperan sebagai untuk mendorong pencapaian tujuan dan cita-cita Indonesia, melalui pemilihan umum. Peran tersebut mendorong partai politik untuk bisa lebih leluasa menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Tiap individu, diharapkan dapat memiliki kesadaran politik yang diwujudkan melalui penyampaian aspirasi, saran, dan kritik, secara sadar terhadap aktivitas politik di Indonesia. Oleh sebab itu, partai politik dapat menyediakan media/wadah aspirasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan pula terjadi komunikasi, interaksi, dan integrasi antara partai politik dengan warga negara dalam rangka pencapaian tujuan negara Indonesia yang lebih baik. Meskipun bukan lembaga struktural negara, partai politik tetap menjadi pilar demokrasi yang berperan penting dalam proses pemerintahan dan kehidupan bernegara (MS & Andryan, 2021).

Dalam konteks demokrasi, partai politik berperan sebagai aktor kunci dalam proses formulasi kepentingan di sistem politik sebuah negara, termasuk Indonesia. Berikut ini penjelasan peranan partai politik di pilkada maupun pemilu dalam sistem negara demokrasi. Terkait inilah, maka artikulasi politik harus dapat dilakukan baik oleh partai politik kepada pemerintah, maupun dari masyarakat kepada partai politik untuk diteruskan kepada pemerintah. Sebagai pilar demokrasi, partai politik bertugas mendidik masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi dalam politik, melalui berbagai bentuk kampanye seperti konferensi pers, safari politik, talk show, debat, dan pemasangan media promosi, yang secara efektif membantu warga dalam membuat pilihan politik yang tepat dan menyalurkan hak-hak masyarakat pada hari pemilihan (Hermawan, 2020). Peneliti terdahulu menjelaskan bahwa beberapa faktor pendukung dan penghambat juga dapat memengaruhi keberhasilan dari pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Suryani

Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, Dan Bermoral Di Kabupaten Sumedang

(Wangsih, R. Nina Karina, Annisa Rahmanita)

& Suryanef (2022) bahwa keberhasilan program pendidikan politik didukung oleh sumber daya manusia partai yang terampil, antusiasme masyarakat, dan pendanaan yang memadai, sementara hambatannya meliputi keterbatasan dana serta sikap apatis dan skeptis dari masyarakat.

2.1.3. Partisipasi Politik

Ketidakterlibatan partai politik dalam pendidikan politik publik dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, yang berpotensi menciptakan kondisi politik kurang sehat dan meningkatkan angka golput akibat rendahnya partisipasi publik (Kusuma et al., 2020). Dalam negara demokrasi, maka partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara merupakan hal yang harus terjadi dalam proses politik. Setiap aktivitas warga negara yang memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, dikategorikan sebagai partisipasi politik (Damsar, 2010). Dengan demikian, partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik suatu negara. Melalui partisipasi politik, diharapkan masyarakat dapat turut serta dalam pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan bersama. Semoga dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini, masyarakat dapat semakin aktif dan berperan dalam membangun negara yang lebih baik. Agar masyarakat dapat berpartisipasi politik dengan benar dan bermanfaat, maka diperlukan adanya pendidikan politik.

2.1.4. Keterlibatan Politik

Keterlibatan politik merupakan hak setiap warga negara untuk menyalurkan ide atau gagasan politiknya melalui wadah partai politik dalam suatu sistem politik. Terdapat berbagai keterlibatan yang dapat diwujudkan oleh setiap warga negara, diantaranya dapat terlibat dalam proses perencanaan kebijakan, prosesnya, maupun evaluasinya. Untuk dapat terlibat dalam politik secara aktif baik dalam proses input (pengambilan kebijakan) maupun dalam proses output (pengawasan kebijakan), maka diperlukan adanya pendidikan politik yang dapat memberi pencerahan terhadap masyarakat, pendidikan politik yang rasional dan bermoral berbasis konstitusional bukan pendidikan yang bersifat doktrinitas.

2.1.5. Pertimbangan Politik

Pertimbangan politik harus menjadi bagian dari kesadaran politik yang berbasis wawasan politik dan moralitas. Pilihan politik harus dipertimbangkan oleh setiap individu dengan matang serta menghindari pengaruh-pengaruh negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan pemberian uang atau *money politic*. Pertimbangan politik yang didasarkan pada *money politic* cenderung akan merusak demokrasi dan melahirkan keputusan politik yang tidak memihak pada kepentingan rakyat. Agar pertimbangan politik masyarakat melahirkan pilihan yang objektif, cerdas dan bermoral, maka pendidikan politik harus dilakukan oleh lembaga independen yang tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok (*vested interest*). Memang dalam undang-undang tentang partai politik dikatakan, bahwa salah satu fungsi partai politik adalah memberi pendidikan politik kepada anggota atau masyarakat. Namun tentu saja dalam prakteknya lebih cenderung bersifat doktrinas politik dari pada pendidikan politik yang mencerahkan dan bermoral.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada paparan data hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pendidikan politik oleh partai politik dalam meningkatkan kualitas masyarakat pada pemilu yang cerdas dan bermoral belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan data hasil penelitian capaiannya hanya 45,17% yang berarti di bawah moderat atau sedang. Dari 5 (lima) indikator pendidikan politik, skor yang paling rendah ada pada kesadaran politik masyarakat yang kurang tersentuh oleh pendidikan politik, yakni hanya mencapai 44.24%. Implikasi dari simpulan di atas menuntut: 1) Perlu adanya sistem pendidikan politik yang netral atau di luar pendidikan politik yang

dilakukan oleh partai politik yang cenderung doktrinasi dan pembodohan masyarakat; 2) Pendidikan politik harus lebih diarahkan pada peningkatan kesadaran terhadap hak politik masyarakat yang dijalankan dengan pertimbangan akal sehat dan moralitas. Berdasarkan pada simpulan dan implikasi di atas, maka direkomendasikan: 1) Kiranya diperlukan adanya standarisasi kurikulum atau isi program pendidikan politik bagi masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh pihak yang berwenang atau ditetapkan oleh undang-undang; 2) Kiranya perlu dibentuk lembaga independent yang dapat menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai moralitas serta terbebas dari *vested interest* sehingga lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- AkbarAba, Suryadi, K., & Matang. (2023). Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada. *Jurnal Pinus*, 8(2). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29407/pn.v8i2.19593>
- Andika, M., & Try Setyasih, E. (2024). *Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik (Studi Partai Demokrat Dan Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/17916/>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana Prenada Media Group.
- Gustiar, E. D., US, K. A., Isma, A. Political Education As A Foundation For Development: Educational Systems, Strategies And Techniques. *IJEVSS* 02(01).
- Hasyim, A., & Azkia, S. S. S. (2023). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.281>
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jpphk.v10i1.939>
- HS, R. T. (2023). Jabarkan Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilu, Puadi Harap TNI Netral. *BAWASLU*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jabarkan-pelanggaran-administrasi-dan-pidana-pemilu-puadi-harap-tni-netral>
- Jannah, R. (2023). *Implementasi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik (Studi di Kota Semarang)* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang.]. <https://repository.unissula.ac.id/30470/>
- Jie, L. (2024). Challenges and content structure optimization of ideological and political education in universities based on structural equations. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1). 10.2478/amns.2023.2.00425
- Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2150.164-169>
- MS, B. A. K., & Andryan. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1). <https://doi.org/0.31289/jiph.v8i1.4744>
- Prasetya, K. C., & Ishaq, Z. (2024). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Josh: Journal of Sharia*, 03(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.805>
- Riduwan. (2009). *Dasar-Dasar Statistika*. Alfabeta.
- Ruslan, U. A. M. (2000). *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Era Intermedia.
- Rusman, D. (2000). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Bandung: Guepedia Publisher.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (ke-2)*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Suryani, R., & Suryanef, S. (2022). Program Pendidikan Politik oleh Partai Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020 Studi pada DPD PAN dan DPC Gerindra di Nagari Talang Kabupaten Solok. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jecco.v2i1.10>
- Zheng, Q. (2024). Research on the ideologic and politic education of college students based on big data analysis. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1). 10.2478/amns.2023.2.00931



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

